

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

**Yundy Hafziandra<sup>1</sup>**  
yundyhafzrianda@gmail.com

**Vatreane<sup>2</sup>**  
vatreensarongallo@gmail.com

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the influence of budget planning, budget implementation, and monitoring and evaluation on the level of budget absorption in the Mimika Regency Regional Secretariat. The problem of low budget absorption that often occurs at the end of the fiscal year is an important background, because it can cause suboptimal utilization of public funds and hinder the achievement of development targets. The research method used is a descriptive quantitative method with a survey approach through a questionnaire. The population in this study were all employees of the Mimika Regency Regional Secretariat involved in the process of budget planning, implementation, and monitoring. Data analysis was carried out using multiple linear regression analysis to test the effect of independent variables on the dependent variable. The R-Square ( $R^2$ ) on the Budget Absorption variable (Y) of 0.786 indicates that 78.6% of the variation in budget absorption can be explained by three independent variables, namely Budget Planning (X1), Budget Implementation (X2), and Monitoring & Evaluation (X3). The Adjusted R-Square value (0.765) which is close to  $R^2$  indicates that the model does not experience overfitting, so that the three variables collectively have a significant influence on budget absorption. Theoretically, this research strengthens the literature in the field of public financial management, particularly regarding performance-based management models and the principles of good governance. Practically, the research findings provide recommendations for local governments to improve planning systems, increase implementation capacity, and strengthen oversight to promote effective regional budget utilization.*

*Keywords: Budget Absorption, Regional Secretariat*

### PENDAHULUAN

Lahirnya otonomi daerah memberikan pandangan baru bagi pemerintah Indonesia. semua urusan yang pada awalnya dikelola oleh pemerintah pusat kini dilimpahkan kepada pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pelimpahan tersebut dilakukan karena pemerintah pusat menganggap bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui dan paham akan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah ini, berarti bahwa setiap daerah memiliki kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri terkait pemerintahannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Seiring dengan bergulirnya era otonomi daerah, terdapat sebuah fenomena yang menarik yaitu rendahnya tingkat serapan anggaran dan serapan anggaran yang menumpuk di akhirtahun. Fenomena rendahnya tingkat serapan anggaran terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dan terus terjadi setiap tahunnya, hal ini dibuktikan dengan kecenderungan persentase penyerapan anggaran yang kurang dari 75% pada akhir triwulan III. Idealnya penyerapan anggaran itu dapat terjadwal, yaitu 25% pada triwulan I, 50% pada triwulan II, 75% pada triwulan III, dan 100% pada triwulan IV (BPKP, 2011). Kegagalan target penyerapan anggaran berakibat pada hilangnya manfaat belanja, karena tidak semua dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan (idle money). Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran.

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

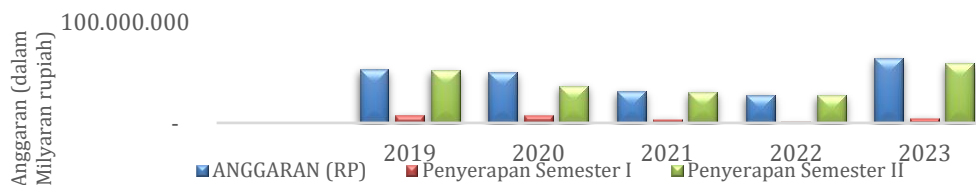
<sup>2</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan suatu daerah atau instansi. Melalui pengukuran penyerapan anggaran, kita dapat menilai kinerja dan kemampuan organisasi, baik pemerintah maupun swasta, dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan (Fajar & Arfan, 2017). Menurut Halim (84:2014) penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran). Penyerapan anggaran dipengaruhi oleh manajemen anggaran, yang sering disebut sebagai Publik Financial Management (PFM). Bastian (2021, p. 3) menyatakan bahwa manajemen anggaran yang efektif adalah salah satu elemen kunci dalam pengelolaan keuangan publik. Salah satu tantangan dalam anggaran pemerintah adalah rendahnya penyerapan di awal tahun, yang kemudian menumpuk di akhir tahun fiskal, menyebabkan ketidakmerataan dalam penyerapan anggaran (Salamah, 2018; Suwarni & Muhammad, 2018).

Menurut laporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika (2023), penyerapan anggaran daerah dalam hal ini Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, pada Semester I ada di persentase berada pada angka yang memprihatinkan, dengan hanya 31% dari total anggaran yang terealisasi hingga akhir tahun. Hal ini menunjukkan adanya penumpukan anggaran yang signifikan pada akhir tahun, yang dapat berdampak pada efektivitas program dan kebijakan yang telah direncanakan. Dalam hal ini, optimalisasi penyerapan anggaran menjadi penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Penyerapan anggaran yang rendah sering kali menjadi masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Mimika khususnya pada Sekretariat Daerah. Hal ini berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dan berdampak pada pelayanan pimpinan daerah. Sekretariat Daerah adalah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Mimika yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Berikut adalah diagram dan tabel rincian Anggaran dan Penyerapan Anggaran Per Semester dari Tahun Anggaran 2019 sampai 2023 di Kabupaten Mimika dan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika:

**Gambar 1. Grafik Penyerapan Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Mimika**

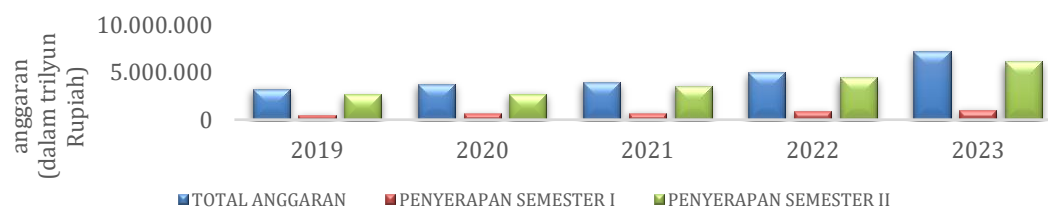


**Tabel 1. Penyerapan Anggaran pada Sekretariat Daerah Kab. Mimika**

Nomor	Tahun	Anggaran (Rp)	Serapan (Rp)	Serapan (%)	
				Semester I	Semester II
1	2019	345.147.217.964	306.887.537.236	10,10	88,91
2	2020	336.746.483.079	255.328.273.548	7,65	75,82
3	2021	294.414.479.176	280.718.437.891	15,46	95,35
4	2022	580.076.462.566	510.756.413.500	8,29	88,05
5	2023	788.809.751.622	622.894.215.217	8,03	78,97
Rata-Rata				9,91	85,42

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Mimika

**Gambar 2. Grafik Penyerapan Anggaran Seluruh OPD di Kabupaten Mimika**



**Tabel 2. Penyerapan Anggaran Seluruh OPD di Kabupaten Mimika**

Nomor	Tahun	Anggaran (Rp)	Serapan (Rp)	Serapan (%)	
				Semester I	Semester II
1	2019	3.258.548.389.098	2.640.075.980.012	16,37	81,02
2	2020	3.736.441.714.550	2.687.169.650.505	17,60	71,92
3	2021	3.878.922.358.354	3.551.551.786.623	17,53	91,56
4	2022	4.983.328.497.097	4.425.055.865.198	17,68	88,80
5	2023	7.197.481.873.864	6.119.180.929.670	14,35	85,02
Rata-Rata				16,70	83,66

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab. Mimika

Dari data tabel diatas, kita bisa melihat perbandingan persentasi penyerapan anggaran setiap semester dalam 5 tahun anggaran berturut-turut di Kabupaten Mimika dan pada Sekretariat Daerah yaitu pada semester I tahun anggaran 2019 – 2023 rata-rata penyerapan anggaran di Kabupaten Mimika hanya berkisar 16,70 %, dan pada semester II tahun anggaran 2019-2023 rata-rata penyerapan anggaran melonjak ke 83,66%. Sementara pada Sekretariat Daerah , pada Semester I tahun anggaran 2019-2023 rata-rata penyerapan anggaran berkisar 9,91%, dan pada semester II Tahun Anggaran 2019-2023 rata-rata penyerapan anggaran ada di angka 85,42% . Jika penyerapan anggaran sesuai dengan waktu , maka penyerapan anggaran di Semester I harus berkisar 50% dari total anggaran dan pada akhir tahun harus mencapai 95%.

Penelitian mengenai penyerapan anggaran telah banyak dilakukan, Menurut Elim (2018), faktor perencanaan dan pelaksanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, komitmen manajemen, dan lingkungan birokrasi turut menentukan tinggi rendahnya serapan anggaran .Penelitian-penelitian terdahulu dilakukan oleh Pristianto (2021), Abubakar (2021), Dian Juliani (2014), dan Sari R (2021). Secara umum, faktor-faktor yang berpotensi digunakan dalam penelitian ini berdasarkan penelitian-penelitian tersebut baik Faktor Internal berupa Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan anggaran, Sistem Pengawasan dan Evaluasi.

## METODE ANALISIS

### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Sugiyono (2007) menjelaskan statistik deskriptif adalah statistik yang dipergunakan untuk analisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul apa adanya tanpa berniat untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian secara umum atau generalisasi. Sedangkan Rimata (2014) menyatakan bahwa statistik deskriptif dipergunakan untuk analisis data dan menyajikan data kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Dalam penelitian ini akan menggunakan analisis Deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden serta data yang diperoleh dari kuesioner. Pendekatan statistik deskriptif, seperti rata-rata, median, dan distribusi frekuensi, untuk memberikan gambaran umum mengenai variabel-variabel yang diteliti, seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan dan evaluasi anggaran.

### 2. Uji Kualitas Data

#### a. Uji Validitas

Validitas adalah syarat/ketentuan yang dibutuhkan tetapi tidak cukup untuk menguji kebaikan suatu ukuran (Sekaran dan Bougie, 2016). Rimata (2014) menyatakan uji validitas adalah pengujian yang dilakukan guna memastikan kemampuan dari skala untuk mengukur konsep yang dimaksudkan. Manfaat dari uji validitas yaitu untuk mengetahui apakah poin-poin yang tercantum dalam kuesioner benar-benar mampu/sanggup mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti (Rimata, 2014). Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan construct validity menggunakan dua metode yaitu convergent validity and discriminant validity.

#### b. Uji Reliabilitas

Sekaran dan Bougie (2016) menyatakan bahwa reliabilitas (keandalan) pengukuran memperlihatkan sejauh mana pengukuran dilakukan tanpa bias (bebas kesalahan) dan memastikan pengukuran yang sama/konsisten sepanjang waktu dan diberbagai poin dalam instrument. Sekaran dan Bougie (2016) menjelaskan bahwa keandalan suatu ukuran merupakan

sebuah indikasi stabilitas serta konsistensi dimana instrument mengukur konsep dan memudahkan menilai kebaikan dari suatu ukuran. Ghozali (2011) menjelaskan bahwa kuesioner dinyatakan reliable atau andal apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan dalam kuesioner adalah konsisten, stabil, atau sama dari waktu ke waktu. Reliabilitas dapat diuji dengan menggunakan composite reliability yaitu dengan melihat nilai dari cronbach alpha. Suatu konstruk atau variabel dapat disebut reliable apabila variabel tersebut memberikan nilai korelasi atau nilai cronbach alpha > 0,70 (Ghozali, 2011). Namun, nilai korelasi > 0,6 dalam penelitian yang menggunakan pendekatan eksploratori masih dianggap reliable/dianggap memadai. (Ghozali dan Latan, 2015)

**3. R-Square, F-Square dan Q-Square**

Rimata (2014) menjelaskan koefisien determinasi dipergunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model mampu menerangkan variasi dari variabel-variabel dependen. Koefisien determinasi (R-Square) memiliki nilai antara nol hingga satu. Nilai R-Square (R2) yang kecil dapat diartikan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas sedangkan apabila nilai R-Square (R2) mendekati satu dapat diartikan variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk menerangkan variasi variabel dependen (Rimata, 2014).

Pengujian Effect Size/F-Square (F2) dilakukan untuk mengetahui kebaikan model. Ghozali dan Latan (2015) menyatakan bahwa nilai Effect Size/F-Square (F2) adalah 0,02 (kecil); 0,15 (menengah); dan 0,35 (kuat). Pengujian Prediction Relevance (Q-Square) dilakukan untuk mengetahui kapabilitas/relevansi prediktif. Besaran Q-Square (Q2) mempunyai rentang nilai 0 < Q2 < 1. Dapat diartikan bahwa nilai Q-Square (Q2) semakin besar dan mendekati 1 adalah semakin baik.

**4. Analisis Regresi Linear Berganda**

Penelitian ini juga menggunakan Analisis Regresi yang merupakan metode yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan dan evaluasi anggaran, dengan variabel dependen, yaitu Penyerapan anggaran. Pendekatan yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, yang bertujuan untuk menentukan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap penyerapan anggaran dan mengidentifikasi faktor-faktor signifikan yang memengaruhi proses tersebut. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang hubungan antara variabel-variabel tersebut dan membantu dalam memahami faktor-faktor kunci yang mempengaruhi penyerapan anggaran.

Analisis regresi linear berganda, teknik analisis data dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik Ordinary Least Square (OLS). Dengan tekniteknik Ordinary Least Square (OLS) sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Dimana:

- Y = Penyerapan Anggaran
- X1= Perencanaan Anggaran
- X2= Pelaksanaan Anggaran
- X3= Pengawasan dan Evaluasi
- α = Konstanta (Intersep)
- β1, β2 = Koefisien

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

**1. Karakteristik Responden**

**Tabel 3. Karakteristik Responden Penelitian**

No	Karakteristik	Kategori	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	20	57,14%
		Perempuan	15	42,86%

No	Karakteristik	Kategori	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
2	Usia	< 30 tahun	5	14,29%
		30–39 tahun	12	34,29%
		40–49 tahun	10	28,57%
		≥ 50 tahun	8	22,85%
3	Pendidikan Terakhir	D3	6	17,14%
		S1	23	65,71%
		S2	6	17,14%
4	Instansi	Sekretariat Daerah	35	100%
5	Jabatan	Staf Pelaksana	15	42,86%
		Kepala Subbagian / Seksi	15	42,86%
		Kepala Bagian/ Eselon III	5	14,28%
6	Lama Bekerja	< 5 tahun	4	11,43%
		5–10 tahun	13	37,14%
		> 10 tahun	18	51,43%

Sumber: data primer diolah tahun 2025

Penelitian ini melibatkan 35 responden yang berasal dari berbagai instansi pemerintah daerah. Karakteristik responden dianalisis berdasarkan enam variabel, yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, instansi, jabatan, dan lama bekerja. Informasi ini penting untuk memahami profil responden serta untuk menjamin keberagaman sudut pandang dalam menjawab kuesioner penelitian.

Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden adalah laki-laki sebanyak 20 orang (57,14%), sementara responden perempuan berjumlah 15 orang (42,86%). Komposisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan laki-laki dalam struktur birokrasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran masih dominan, meskipun partisipasi perempuan juga cukup signifikan.

Dari segi usia, sebanyak 5 orang (14,29%) berada pada kelompok usia di bawah 30 tahun, 12 orang (34,29%) berusia antara 30 hingga 39 tahun, 10 orang (28,57%) berada pada rentang usia 40 hingga 49 tahun, dan 8 orang (22,85%) berusia 50 tahun ke atas. Sebaran ini menunjukkan bahwa responden terdiri dari berbagai kelompok umur, dengan dominasi kelompok usia produktif (30–49 tahun), yang biasanya berada dalam posisi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Dalam hal pendidikan terakhir, mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan strata satu (S1), yakni sebanyak 23 orang (65,71%), kemudian disusul oleh pendidikan strata dua (S2) dan diploma tiga (D3) masing-masing sebanyak 6 orang (17,14%). Tingkat pendidikan ini mencerminkan bahwa sebagian besar responden memiliki kompetensi akademik yang memadai dalam memahami proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran.

Berdasarkan instansi tempat bekerja, 35 responden (100%) berasal dari Sekretariat Daerah yang terdiri dari 9 bagian, yaitu Bagian Tata Pemerintahan, 4 responden (11,42%), berasal dari Bagian Kesejahteraan Masyarakat 5 responden (14,28%), Bagian Hukum 5 responden (14,28%), Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia 4 responden (11,42%), Bagian Administrasi Perekonomian 6 responden (17,14%), Bagian Layanan Pengadaan Barang dan jasa 3 responden (8,57%), Bagian Umum dan Perlengkapan 6 responden (17,14%), bagian Organisasi 2 responden (5,71%), dan bagian Humas dan Protokol 2 responden (5,71%). Keragaman instansi ini memberikan representasi yang menyeluruh terhadap berbagai fungsi Sekretariat Daerah yang terlibat dalam siklus pengelolaan anggaran. Dari sisi jabatan, 15 responden (42,86%) merupakan staf pelaksana, 15 orang (42,86%) menjabat sebagai kepala subbagian atau kepala seksi, dan 5 orang (14,28%) merupakan pejabat struktural eselon III seperti kepala bagian. Komposisi ini menggambarkan bahwa mayoritas responden memiliki peran teknis dan operasional dalam proses penyerapan anggaran, namun sebagian lainnya juga berperan sebagai pengambil keputusan.

Terakhir, berdasarkan lama bekerja, sebanyak 4 orang (11,43%) memiliki pengalaman kerja kurang dari lima tahun, 13 orang (37,14%) telah bekerja selama 5–10 tahun, dan 18 orang (51,43%) memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pengalaman yang cukup lama dalam birokrasi, sehingga memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terhadap proses penganggaran di instansi masing-masing.

**2. Analisis Deskriptif**

**a. Variabel Penyerapan Anggaran**

**Tabel 4. Analisis Deskriptif Variabel Penyerapan Anggaran**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
A1	35	2.00	5.00	3.7714	.97274
A2	35	2.00	5.00	3.9143	.91944
A3	35	2.00	5.00	3.9714	.82197
A4	35	2.00	5.00	3.8571	.94380
A5	35	2.00	5.00	3.8571	.87927
A6	35	2.00	5.00	4.2286	.87735
A7	35	2.00	5.00	4.0857	.81787
A8	35	2.00	5.00	4.2000	.93305
Rata-rata A	35	2.00	5.00	3.9857	.79102
Valid N (listwise)	35				

Sumber: data primer diolah tahun 2025

Variabel ini diukur melalui delapan indikator, dengan rata-rata keseluruhan (mean) sebesar 3,9857 dan standar deviasi 0,79102. Nilai minimum dan maksimum berada pada rentang 2,00 hingga 5,00, yang menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap penyerapan anggaran berada dalam kategori baik. Indikator dengan skor tertinggi adalah *A6* (Jumlah Kegiatan yang Dibiayai) dengan mean 4,2286, menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah dibiayai sesuai dengan rencana anggaran. Sementara itu, indikator *A1* (Jumlah anggaran yang tersisa) memiliki skor terendah yaitu 3,7714, namun tetap dalam kategori baik. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun masih ada sisa anggaran di akhir tahun, jumlahnya relatif kecil.

**b. Variabel Perencanaan Anggaran**

**Tabel 5. Analisis Deskriptif Variabel Perencanaan Anggaran**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
B1	35	3.00	5.00	3.8571	.69209
B2	35	3.00	5.00	4.0857	.74247
B3	35	3.00	5.00	3.8286	.82197
B4	35	1.00	5.00	3.8571	.94380
B5	35	3.00	5.00	4.0857	.70174
B6	35	3.00	5.00	4.0000	.68599
Rata-rata B	35	2.67	5.00	3.9524	.57957
Valid N (listwise)	35				

Sumber: data primer diolah tahun 2025

Variabel perencanaan anggaran diukur melalui enam indikator, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 3,9524 dan standar deviasi 0,57957. Skor mean tertinggi terdapat pada indikator *B2* (Keberhasilan program) dan *B5* (Penerapan SSH), masing-masing 4,0857, menandakan bahwa sebagian besar responden menilai bahwa program berhasil dilaksanakan sesuai rencana dan SSH diterapkan secara konsisten. Indikator dengan nilai terendah adalah *B3* (Peningkatan persentase penyerapan anggaran) dengan skor 3,8286, yang meskipun termasuk kategori baik, menunjukkan bahwa peningkatan penyerapan belum sepenuhnya optimal setiap tahun. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran telah dilaksanakan dengan cukup baik, memperhatikan berbagai aspek penting seperti strategi, efisiensi, serta konsistensi penerapan standar belanja.

**c. Variabel Pelaksanaan Anggaran**

**Tabel 6. Analisis Deskriptif Variabel Pelaksanaan Anggaran**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
C1	35	1.00	5.00	3.8857	.93215
C2	35	2.00	5.00	3.9714	.66358
C3	35	1.00	5.00	3.6286	1.03144

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
C4	35	2.00	5.00	4.2857	.75035
C5	35	2.00	5.00	4.0857	.91944
C6	35	2.00	5.00	4.0571	.90563
C7	35	2.00	5.00	3.6857	.93215
C8	35	2.00	5.00	4.0857	.61220
C9	35	2.00	5.00	4.0000	.76696
C10	35	2.00	5.00	3.9429	.72529
Rata-rata C	35	2.10	5.00	3.9629	.64766
Valid N (listwise)	35				

Sumber: data primer diolah tahun 2025

Variabel ini terdiri dari 10 indikator, dengan rata-rata (mean) keseluruhan 3,9629 dan standar deviasi 0,64766. Indikator dengan skor tertinggi adalah C4 (Transparansi) dengan nilai 4,2857, yang menunjukkan bahwa responden menilai tinggi terhadap keterbukaan dalam proses pelaksanaan anggaran. Sementara itu, indikator dengan skor terendah adalah C3 (Efisiensi Biaya) dengan nilai 3,6286, menandakan bahwa efektivitas biaya dalam pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan. Rata-rata skor yang mendekati 4,0 menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan cukup baik, dengan beberapa indikator yang menunjukkan penerapan prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, serta pengadaan berbasis elektronik.

**d. Variabel Pengawasan dan Evaluasi**

**Tabel 7. Analisis Deskriptif Variabel Pengawasan dan Evaluasi**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
D1	35	2.00	5.00	3.9714	.95442
D2	35	2.00	5.00	3.8571	1.00419
D3	35	2.00	5.00	3.9429	.80231
D4	35	2.00	5.00	4.0571	.87255
D5	35	2.00	5.00	4.0286	.89066
D6	35	2.00	5.00	4.0571	.87255
D7	35	2.00	5.00	3.9714	.92309
Rata-rata D	35	2.14	5.00	3.9837	.78382
Valid N (listwise)	35				

Sumber: data primer diolah tahun 2025

Variabel pengawasan dan evaluasi memiliki tujuh indikator dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 3,9837 dan standar deviasi 0,78382. Skor tertinggi dicapai oleh indikator D4 dan D6 (Kepatuhan regulasi pengadaan dan rekomendasi monev) masing-masing dengan mean 4,0571, menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan tindak lanjut hasil evaluasi berjalan dengan baik. Nilai terendah terdapat pada indikator D2 (Jumlah evaluasi) dengan skor 3,8571, yang masih tergolong baik namun mengindikasikan bahwa intensitas evaluasi masih dapat ditingkatkan. Data ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan dan evaluasi telah berfungsi secara efektif, mendukung akuntabilitas pelaksanaan anggaran, serta mendorong perbaikan berkelanjutan melalui tindak lanjut evaluasi dan audit internal.

**3. Hasil Uji Validitas**

**a. Converget Validity**

**Tabel 8. Hasil Uji Validitas**

•	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ((O/STDEV))	P values
A1 <- Penyerapan Anggaran (Y)	0.870	0.868	0.042	20.532	0.000
A2 <- Penyerapan Anggaran (Y)	0.908	0.904	0.035	25.653	0.000
A3 <- Penyerapan Anggaran (Y)	0.816	0.810	0.068	11.950	0.000

•	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ((O/STDEV))	P values
A4 <- Penyerapan Anggaran (Y)	0.865	0.865	0.044	19.706	0.000
A5 <- Penyerapan Anggaran (Y)	0.914	0.911	0.029	31.060	0.000
A6 <- Penyerapan Anggaran (Y)	0.883	0.881	0.045	19.625	0.000
A7 <- Penyerapan Anggaran (Y)	0.898	0.894	0.039	22.855	0.000
A8 <- Penyerapan Anggaran (Y)	0.906	0.902	0.033	27.113	0.000
B1 <- Perencanaan Anggaran (X1)	0.799	0.785	0.078	10.204	0.000
B2 <- Perencanaan Anggaran (X1)	0.810	0.806	0.064	12.722	0.000
B3 <- Perencanaan Anggaran (X1)	0.790	0.793	0.057	13.950	0.000
B4 <- Perencanaan Anggaran (X1)	0.775	0.770	0.066	11.759	0.000
B5 <- Perencanaan Anggaran (X1)	0.716	0.714	0.087	8.261	0.000
B6 <- Perencanaan Anggaran (X1)	0.630	0.608	0.127	4.946	0.000
C1 <- Pelaksanaan Anggaran (X2)	0.809	0.792	0.082	9.884	0.000
C10 <- Pelaksanaan Anggaran (X2)	0.755	0.735	0.119	6.326	0.000
C2 <- Pelaksanaan Anggaran (X2)	0.747	0.726	0.117	6.387	0.000
C3 <- Pelaksanaan Anggaran (X2)	0.835	0.833	0.043	19.277	0.000
C4 <- Pelaksanaan Anggaran (X2)	0.789	0.779	0.090	8.784	0.000
C5 <- Pelaksanaan Anggaran (X2)	0.865	0.870	0.039	22.048	0.000
C6 <- Pelaksanaan Anggaran (X2)	0.843	0.840	0.047	18.034	0.000
C7 <- Pelaksanaan Anggaran (X2)	0.658	0.650	0.124	5.283	0.000
C8 <- Pelaksanaan Anggaran (X2)	0.656	0.637	0.132	4.976	0.000
C9 <- Pelaksanaan Anggaran (X2)	0.836	0.842	0.040	20.828	0.000
D1 <- Pengawasan dan Evaluasi (X3)	0.926	0.923	0.028	32.544	0.000
D2 <- Pengawasan dan Evaluasi (X3)	0.853	0.850	0.048	17.926	0.000
D3 <- Pengawasan dan Evaluasi (X3)	0.795	0.794	0.063	12.681	0.000
D4 <- Pengawasan dan Evaluasi (X3)	0.839	0.834	0.050	16.838	0.000
D5 <- Pengawasan dan Evaluasi (X3)	0.895	0.889	0.040	22.355	0.000
D6 <- Pengawasan dan Evaluasi (X3)	0.851	0.847	0.060	14.225	0.000
D7 <- Pengawasan dan Evaluasi (X3)	0.904	0.904	0.031	29.462	0.000

Sumber: data primer diolah tahun 2025

Berdasarkan hasil uji outer loading dalam analisis PLS, semua indikator memiliki nilai outer loading di atas 0,5 sehingga dinyatakan valid, dengan sebagian besar indikator bahkan mencapai ideal loading di atas 0,7. Indikator seperti A5 (0,914), A8 (0,906), D1 (0,926), dan

D7 (0,904) menunjukkan korelasi yang sangat kuat dengan konstruknya, sementara beberapa indikator seperti B6 (0,630), C7 (0,658), dan C8 (0,656) meskipun valid (karena > 0,5), memiliki loading yang relatif lebih rendah dibandingkan indikator lainnya. Nilai T-statistics yang signifikan (semua > 1,96) dan p-values 0,000 mengonfirmasi bahwa semua indikator signifikan dalam mengukur konstruk latennya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua indikator memenuhi kriteria validitas convergent.

**b. Discriminan Validity**

**Tabel 9. Hasil Uji Discriminan Validity**

	Pelaksanaan Anggaran (X2)	Pengawasan dan Evaluasi (X3)	Penyerapan Anggaran (Y)	Perencanaan Anggaran (X1)
Pelaksanaan Anggaran (X2)	0.782			
Pengawasan dan Evaluasi (X3)	0.470	0.867		
Penyerapan Anggaran (Y)	0.715	0.754	0.883	
Perencanaan Anggaran (X1)	0.521	0.709	0.742	0.756

Sumber: data primer diolah tahun 2025

Berdasarkan uji diskriminan menggunakan Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT), nilai HTMT antara konstruk menunjukkan bahwa semua pasangan variabel memiliki nilai di bawah 0,85 (kriteria umum) atau 0,90 (kriteria lebih longgar), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat validitas diskriminan yang baik antar konstruk. Namun, beberapa hubungan menunjukkan nilai yang relatif tinggi, seperti antara Perencanaan Anggaran (X1) dan Penyerapan Anggaran (Y) (HTMT = 0,823) serta antara Penyerapan Anggaran (Y) dan Pengawasan & Evaluasi (X3) (HTMT = 0,775), yang mengindikasikan kemungkinan adanya kedekatan konseptual antara konstruk-konstruk tersebut. Meskipun demikian, karena tidak melebihi batas kritis 0,85, dapat disimpulkan bahwa setiap konstruk masih memenuhi syarat validitas diskriminan dalam model.

**4. Hasil Uji Reliabilitas**

**Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas**

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Pelaksanaan Anggaran (X2)	0.928	0.935	0.940	0.612
Pengawasan dan Evaluasi (X3)	0.945	0.951	0.955	0.752
Penyerapan Anggaran (Y)	0.959	0.962	0.966	0.780
Perencanaan Anggaran (X1)	0.850	0.863	0.888	0.572

Sumber: data primer diolah tahun 2025

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua konstruk dalam penelitian ini memenuhi syarat reliabilitas dengan nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability (rho\_a & rho\_c) di atas 0,7, yang mengindikasikan konsistensi internal yang sangat baik. Nilai Cronbach's Alpha tertinggi terdapat pada Penyerapan Anggaran (Y) (0,959) dan terendah pada Perencanaan Anggaran (X1) (0,850), namun keduanya tetap memenuhi kriteria reliabilitas. Selain itu, Composite Reliability (rho\_c) juga berada di atas 0,7, dengan nilai tertinggi pada Penyerapan Anggaran (Y) (0,966) dan terendah pada Perencanaan Anggaran (X1) (0,888), memperkuat bukti bahwa indikator-indikator dalam setiap konstruk secara konsisten mengukur variabel yang sama. Sementara itu, Average Variance Extracted (AVE) untuk semua konstruk melebihi 0,5, kecuali Pelaksanaan Anggaran (X2) (0,612) dan Perencanaan Anggaran (X1) (0,572), yang tetap dapat diterima karena nilai Composite Reliability-nya sudah tinggi, sehingga secara keseluruhan konstruk-konstruk tersebut reliabel dan layak digunakan dalam analisis lebih lanjut.

5. Hasil Uji R Square

Tabel 10. Hasil R Square

	R-square	Q-square	R-square adjusted
Penyerapan Anggaran (Y)	0.786	0.786	0.765

Sumber: data primer diolah tahun 2025

R-Square ( $R^2$ ) pada variabel Penyerapan Anggaran (Y) sebesar 0,786 menunjukkan bahwa 78,6% variasi dalam penyerapan anggaran dapat dijelaskan oleh tiga variabel independen, yaitu Perencanaan Anggaran (X1), Pelaksanaan Anggaran (X2), dan Pengawasan & Evaluasi (X3). Nilai R-Square Adjusted (0,765) yang mendekati  $R^2$  mengindikasikan bahwa model tidak mengalami overfitting, sehingga ketiga variabel tersebut secara kolektif memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sementara itu, Q-Square (0,786) yang bernilai positif dan sama dengan  $R^2$  menunjukkan bahwa model memiliki predictive relevance, artinya model ini mampu memprediksi dengan baik dan relevan secara empiris.

6. Hasil Uji F Square

Tabel 10. Hasil Uji F Square

	Pelaksanaan Anggaran (X2)	Pengawasan dan Evaluasi (X3)	Penyerapan Anggaran (Y)	Perencanaan Anggaran (X1)
Pelaksanaan Anggaran (X2)			0.484	
Pengawasan dan Evaluasi (X3)			0.260	
Penyerapan Anggaran (Y)				
Perencanaan Anggaran (X1)			0.231	

Sumber: data primer diolah tahun 2025

F-Square ( $f^2$ ) digunakan untuk mengukur kontribusi relatif masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil menunjukkan bahwa Pelaksanaan Anggaran (X2) memiliki pengaruh paling kuat ( $f^2 = 0,484$ ) terhadap Penyerapan Anggaran (Y), tergolong efek besar (karena  $> 0,35$ ). Kemudian Pengawasan & Evaluasi (X3) memberikan pengaruh sedang ( $f^2 = 0,260$ ) dan Perencanaan Anggaran (X1) memiliki pengaruh sedang ( $f^2 = 0,231$ ). Ini berarti Pelaksanaan Anggaran (X2) merupakan faktor paling dominan dalam meningkatkan penyerapan anggaran, diikuti oleh Pengawasan & Evaluasi (X3) dan Perencanaan Anggaran (X1).

7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 10. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel Dependen: Penyerapan Anggaran (Y)							
Variabel	Koefisien (B)	Std. Error	Beta ( $\beta$ )	t-hitungan	Sig. (p-value)	t-tabel ( $\alpha=5\%$ )	Keputusan
Konstanta	-0.992	0.519	-	-1.91	0.065	$\pm 2.040$	Tidak Signifikan
Perencanaan (X1)	0.35	0.123	0.346	2.835	0.008	$\pm 2.040$	Signifikan
Pelaksanaan (X2)	0.425	0.173	0.311	2.46	0.02	$\pm 2.040$	Signifikan
Pengawasan (X3)	0.481	0.124	0.394	3.876	0.001	$\pm 2.040$	Signifikan

Berdasarkan hasil analisis regresi, persamaan model dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = -0.992 + 0.350X_1 + 0.425X_2 + 0.481X_3 + e$$

Keterangan:

Y: Penyerapan Anggaran

X<sub>1</sub>: Perencanaan Anggaran

X<sub>2</sub>: Pelaksanaan Anggaran

X<sub>3</sub>: Pengawasan dan Evaluasi

e: Error term (galat acak)

- 1) Konstanta (-0.992)  
 Jika variabel independen ( $X_1, X_2, X_3$ ) bernilai 0, maka penyerapan anggaran (Y) diprediksi sebesar -0.992 unit. Nilai negatif ini secara teoretis dapat diartikan bahwa tanpa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang memadai, penyerapan anggaran cenderung tidak terjadi (bahkan mungkin terjadi defisit). Namun, karena nilai p-value = 0.065 ( $> 0.05$ ), konstanta ini tidak signifikan secara statistik, sehingga interpretasinya perlu hati-hati.
- 2) Koefisien Perencanaan Anggaran ( $X_1$ ) = 0.350  
 Artinya, setiap peningkatan 1 unit dalam Perencanaan Anggaran ( $X_1$ ), akan meningkatkan Penyerapan Anggaran (Y) sebesar 0.350 unit, dengan asumsi ceteris paribus (variabel lain dianggap konstan). Nilai p-value = 0.008 ( $< 0.05$ ) menunjukkan bahwa pengaruh ini signifikan secara statistik. Hal ini menegaskan bahwa perencanaan yang matang berkontribusi positif terhadap efisiensi penyerapan anggaran.
- 3) Koefisien Pelaksanaan Anggaran ( $X_2$ ) = 0.425  
 Setiap kenaikan 1 unit Pelaksanaan Anggaran ( $X_2$ ) akan meningkatkan Penyerapan Anggaran (Y) sebesar 0.425 unit (ceteris paribus). Koefisien ini signifikan (p-value = 0.020) dan lebih besar dibandingkan  $X_1$ , menunjukkan bahwa implementasi anggaran di lapangan (seperti ketepatan waktu dan prosedur) memiliki dampak lebih kuat dibandingkan sekadar perencanaan.
- 4) Koefisien Pengawasan dan Evaluasi ( $X_3$ ) = 0.481  
 Setiap penambahan 1 unit Pengawasan dan Evaluasi ( $X_3$ ) meningkatkan Y sebesar 0.481 unit, dengan p-value = 0.001 (sangat signifikan). Koefisien ini paling dominan di antara ketiga variabel ( $\beta = 0.394$ ), mengindikasikan bahwa monitoring dan evaluasi yang ketat (seperti audit, pelaporan, dan perbaikan) adalah kunci optimalisasi penyerapan anggaran.

**Tabel 11. Hasil Analisis Uji F dan R<sup>2</sup>**

Uji	Nilai	Kritis ( $\alpha=5\%$ )	Sig.	Keputusan
F-hitungan	33.908	2.92 (F-tabel)	0.000	Model Signifikan
R <sup>2</sup>	0.766	-	-	Kuat (76.6% varians Y dijelaskan)
Adjusted R <sup>2</sup>	0.744	-	-	Model Stabil

Hasil uji F menunjukkan nilai F-hitungan sebesar 33.908 dengan signifikansi 0.000, yang jauh lebih kecil dari tingkat alpha 5% ( $\alpha = 0.05$ ). Nilai ini melebihi F-tabel (2.92) yang dihitung berdasarkan derajat kebebasan numerator ( $k=3$ ) dan denominator ( $n-k-1 = 31$ ). Hal ini membuktikan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan dan minimal ada satu variabel independen ( $X_1, X_2$ , atau  $X_3$ ) yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran (Y). Dengan demikian, model ini layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen, sekaligus mengonfirmasi bahwa kombinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran secara bersama-sama mampu memprediksi penyerapan anggaran secara statistik.

Nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,766 menunjukkan bahwa 76,6% variasi penyerapan anggaran (Y) dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, yaitu perencanaan anggaran ( $X_1$ ), pelaksanaan anggaran ( $X_2$ ), dan pengawasan serta evaluasi ( $X_3$ ). Sementara itu, 23,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model regresi ini, seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, atau variabel lain yang tidak diamati. Dengan demikian, model ini memiliki daya jelas yang cukup tinggi, tetapi masih terdapat ruang untuk memasukkan variabel tambahan guna meningkatkan akurasi prediksi.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Perencanaan Terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil analisis menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini terlihat dari nilai p-value sebesar 0,008 yang lebih kecil dari 0,05, serta nilai t-hitung sebesar 2,835 yang lebih besar dari t-tabel ( $\pm 2,040$ ).

Artinya, semakin baik kualitas perencanaan anggaran, maka semakin tinggi pula tingkat penyerapan anggaran yang dapat dicapai.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Hasni dan Basukianto (2016) yang menunjukkan bahwa perencanaan yang baik, terukur, dan realistis berperan penting dalam meningkatkan penyerapan anggaran daerah. Demikian pula, Ihsan dan Kuntadi (2023) menegaskan bahwa kualitas perencanaan, termasuk dokumen DIPA dan perencanaan kas yang akurat, memiliki hubungan erat dengan keberhasilan pelaksanaan anggaran. Lebih lanjut, Ani, Mulyadi, dan Pratowo (2020) menambahkan bahwa perencanaan berperan sebagai pemoderasi dalam meningkatkan efektivitas faktor-faktor lain, seperti pelaksanaan dan pengawasan. Ini menunjukkan bahwa tanpa perencanaan yang matang, proses pengelolaan anggaran cenderung mengalami keterlambatan atau inefisiensi.

Menurut Hasni dan Basukianto (2016), perencanaan yang buruk sering kali menjadi penyebab utama rendahnya penyerapan anggaran di pemerintah daerah. Ketidaksi sinkronisasi antara rencana strategis dan anggaran tahunan dapat menimbulkan ketidaksesuaian kegiatan dengan kebutuhan riil. Ini dapat mengakibatkan program tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, atau bahkan tertunda, sehingga menghambat proses penyerapan anggaran. Ani et al. (2020) juga menjelaskan bahwa perencanaan bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga membutuhkan analisis yang kuat terhadap data historis dan kebutuhan masa depan. Dalam hal ini, perencanaan berfungsi sebagai jembatan antara visi pembangunan dan pelaksanaan nyata di lapangan. Ketika perencanaan dilakukan secara partisipatif dan berbasis data, maka efektivitas penggunaan anggaran dapat lebih terarah dan akuntabel.

Lebih jauh lagi, Ihsan dan Kuntadi (2023) menyoroti pentingnya perencanaan kas yang akurat dan penyusunan DIPA yang berkualitas. Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan menjadi kunci bagi proses realisasi anggaran sejak awal tahun anggaran. Jika proses perencanaan mengalami keterlambatan atau tidak akurat, maka pelaksanaan anggaran akan terkendala sejak awal. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas SDM perencana dan penggunaan sistem informasi perencanaan menjadi sangat penting dalam mendukung efektivitas serapan anggaran.

## **2. Pengaruh Pelaksanaan Terhadap Penyerapan Anggaran**

Variabel pelaksanaan anggaran juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran dengan nilai p-value sebesar 0,02 dan t-hitung 2,46. Ini menunjukkan bahwa kemampuan instansi dalam mengeksekusi program sesuai jadwal, prosedur, dan target sangat menentukan seberapa besar anggaran dapat terserap secara optimal.

Penelitian oleh Safpremi, Putri, dan Ahyaruddin (2022) membuktikan bahwa pelaksanaan yang disiplin dan sesuai dengan rencana kerja dapat meningkatkan efektivitas realisasi anggaran. Makmur (2021) juga menegaskan bahwa keterlambatan dalam pelaksanaan program, minimnya koordinasi antar unit kerja, serta kurangnya kesiapan teknis menjadi faktor utama rendahnya penyerapan anggaran. Patiran dan Bonsapia (2021) menyebutkan bahwa pelaksanaan yang berkualitas harus didukung oleh kompetensi SDM dan komitmen organisasi. Ini berarti bahwa aspek pelaksanaan tidak hanya terkait dengan teknis kegiatan, tetapi juga kesiapan struktur birokrasi dalam merespon dinamika program kerja.

Makmur (2021) menemukan bahwa pelaksanaan yang tidak disiplin, keterlambatan dalam proses pengadaan, serta kurangnya kesiapan teknis lapangan sering menjadi penyebab utama rendahnya penyerapan anggaran. Faktor-faktor ini tidak hanya menghambat realisasi anggaran, tetapi juga berdampak pada kualitas hasil kegiatan. Oleh karena itu, koordinasi antarunit kerja dan penguatan fungsi eksekusi menjadi hal penting dalam tahapan pelaksanaan anggaran. Safpremi et al. (2022) juga menekankan pentingnya peran eksekutif dalam memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal. Keterlambatan dalam proses administrasi, seperti pencairan dana dan persetujuan dokumen, sering kali menjadi bottleneck yang menunda pelaksanaan kegiatan. Jika pelaksanaan berjalan lambat pada triwulan awal, maka serapan anggaran akan menumpuk di akhir tahun dan berisiko tidak terserap secara penuh.

Patiran dan Bonsapia (2021) menambahkan bahwa pelaksanaan anggaran juga sangat dipengaruhi oleh kompetensi SDM serta komitmen organisasi. Pelaksana yang tidak memahami peraturan keuangan dan tidak memiliki keahlian teknis akan cenderung

menghindari risiko, yang pada akhirnya memperlambat proses pelaksanaan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas teknis dan manajerial menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan penyerapan anggaran.

### 3. Pengaruh Pengawasan Terhadap Penyerapan Anggaran

Variabel pengawasan memiliki pengaruh paling besar terhadap penyerapan anggaran dengan nilai koefisien tertinggi ( $B = 0,481$ ) dan nilai p-value sangat signifikan (0,001). Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang baik dan sistematis mampu mendorong efektivitas dalam pelaksanaan anggaran dan meminimalkan penyimpangan atau keterlambatan.

Penelitian Lusiawati dan Nugaraha (2024) menegaskan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan secara internal maupun eksternal dapat mempercepat identifikasi kendala dalam pelaksanaan anggaran, serta mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Yunita dan Putra (2018) juga menemukan bahwa pengawasan berkala oleh tim pengendali anggaran memiliki peran krusial dalam memastikan program berjalan sesuai perencanaan. Sementara itu, Waruwu et al. (2024) mengungkapkan bahwa pengawasan yang efektif juga memengaruhi kinerja pegawai dalam menyerap anggaran, terutama di bagian-bagian strategis seperti sekretariat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya berdampak pada sistem, tetapi juga pada perilaku individu dalam organisasi.

Menurut Lusiawati dan Nugaraha (2024), pengawasan yang dilakukan secara berkala dan terstruktur memungkinkan adanya perbaikan langsung terhadap pelaksanaan program. Pengawasan juga berperan sebagai mekanisme kontrol terhadap kemungkinan penyimpangan anggaran, seperti pengeluaran yang tidak sesuai atau keterlambatan yang tidak berdasar. Hal ini membantu menjaga kesesuaian antara realisasi dan perencanaan anggaran.

Penelitian Yunita dan Putra (2018) juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang aktif mampu menekan angka keterlambatan realisasi anggaran, terutama di sektor pelayanan publik. Mereka menyatakan bahwa keberadaan tim monitoring dan evaluasi internal yang bekerja secara periodik dapat meningkatkan kesadaran pegawai dalam menjaga ketepatan waktu dan akurasi dalam pelaksanaan kegiatan. Semakin ketat dan konstruktif pengawasan, semakin besar kemungkinan anggaran terserap secara optimal. Selanjutnya, Waruwu et al. (2024) menekankan bahwa pengawasan juga memengaruhi perilaku pegawai. Dalam organisasi pemerintah, ketika pegawai mengetahui bahwa kinerja mereka dipantau secara rutin, maka mereka akan lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, termasuk dalam proses penyerapan anggaran. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pengawasan tidak hanya berperan sebagai pengendali sistem, tetapi juga sebagai pendorong etika kerja dan kepatuhan birokrasi.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan literatur dalam bidang manajemen keuangan sektor publik, khususnya dalam konteks penyerapan anggaran di organisasi pemerintah. Temuan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara signifikan memengaruhi penyerapan anggaran memperkuat teori-teori manajemen anggaran berbasis kinerja dan prinsip good governance.

Penelitian ini mendukung temuan dari studi sebelumnya seperti Hasni & Basukianto (2016) dan Safpremi et al. (2022) yang menyatakan bahwa ketiga variabel tersebut merupakan faktor utama dalam menentukan efektivitas penyerapan anggaran. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi, penelitian ini menegaskan kembali relevansi model hubungan kausal antarvariabel tersebut, serta memberikan validasi empiris terhadap kerangka kerja yang telah dibangun oleh teori pengelolaan keuangan publik.

Lebih jauh, temuan bahwa pengawasan menjadi variabel paling dominan menunjukkan bahwa aspek kontrol dalam sistem anggaran belum sepenuhnya dioptimalkan dalam banyak organisasi. Ini mengindikasikan bahwa teori-teori lama yang terlalu fokus pada perencanaan perlu dikaji ulang, dan menekankan pentingnya peran kontrol internal dan audit dalam model manajemen keuangan sektor publik yang adaptif terhadap dinamika birokrasi modern.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi yang konkret bagi pemangku kebijakan di pemerintahan, khususnya dalam upaya optimalisasi penyerapan anggaran. Pemerintah daerah, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan lembaga pelaksana anggaran dapat menggunakan temuan ini sebagai dasar untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan anggaran. Misalnya, karena perencanaan

terbukti berpengaruh signifikan, maka perangkat daerah perlu meningkatkan kualitas dokumen perencanaan seperti RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), serta menghindari pola copy-paste dari tahun sebelumnya. Di sisi pelaksanaan, temuan ini mendorong pentingnya peningkatan kapasitas SDM dan efisiensi proses pengadaan barang dan jasa yang kerap menjadi hambatan utama dalam serapan anggaran.

Sementara itu, dalam aspek pengawasan, pemerintah perlu memperkuat fungsi Inspektorat dan unit pengendalian internal, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan monitoring realisasi anggaran. Kegiatan pengawasan tidak hanya dilakukan sebagai formalitas administratif, tetapi juga harus bersifat korektif, prediktif, dan konstruktif untuk mendorong efisiensi dan akuntabilitas keuangan publik.

Penelitian ini menempati posisi penting dalam memperkuat konsistensi hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor penentu penyerapan anggaran, namun juga memberikan pembaharuan dari sisi dominasi pengaruh variabel pengawasan. Jika sebelumnya sebagian penelitian lebih menekankan pada perencanaan sebagai variabel utama, penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan memiliki pengaruh yang lebih kuat, setidaknya dalam konteks daerah yang diteliti.

Hal ini menandai pergeseran fokus dari pendekatan perencanaan sentris ke pendekatan pengawasan-sentris, yang relevan dengan tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya replikatif, tetapi juga kontributif secara teoretis dan kontekstual, serta membuka peluang untuk penelitian lanjutan yang mendalami peran mekanisme kontrol dan akuntabilitas sebagai pendorong utama efektivitas anggaran. Penelitian ini juga relevan secara kontekstual karena dilakukan dalam era pascapandemi, di mana pemerintah dituntut untuk menggunakan anggaran secara lebih efisien dan adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi. Dengan begitu, posisi penelitian ini dapat memperkuat kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dalam reformasi keuangan daerah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Artinya, semakin baik proses perencanaan yang dilakukan mulai dari penyusunan rencana kerja, anggaran, hingga distribusi program maka semakin tinggi pula tingkat penyerapan anggaran yang dapat dicapai. Perencanaan yang berkualitas mampu meminimalisir revisi, menyesuaikan target program dengan kebutuhan riil, serta memastikan kesiapan pelaksanaan sejak awal tahun anggaran.
2. Pelaksanaan anggaran juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu, sesuai prosedur, dan efisien sangat menentukan optimal tidaknya anggaran terserap. Kendala teknis, keterlambatan pelaksanaan, serta minimnya koordinasi antarunit kerja akan berdampak langsung pada keterlambatan realisasi anggaran.
3. Pengawasan memiliki pengaruh paling dominan terhadap penyerapan anggaran. Kegiatan pengawasan yang dilakukan secara rutin, sistematis, dan menyeluruh dapat mencegah penyimpangan serta mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan anggaran. Pengawasan juga mendorong kedisiplinan pegawai dan peningkatan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik.

### **Saran**

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui pelatihan SDM perencana, penggunaan data yang akurat, dan pelibatan lintas sektor dalam penyusunan rencana kegiatan. Pemerintah daerah juga disarankan memanfaatkan sistem informasi perencanaan dan penganggaran terpadu agar proses perencanaan lebih tepat sasaran dan terukur.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dengan memastikan kesiapan teknis, percepatan proses pengadaan, dan peningkatan koordinasi antarunit pelaksana. Selain itu, diperlukan

- penguatan kapasitas pegawai dalam pengelolaan program serta penerapan sistem evaluasi kinerja berbasis hasil agar pelaksanaan tidak hanya memenuhi target anggaran, tetapi juga menghasilkan output yang berkualitas.
- Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal agar dapat mendeteksi potensi masalah sejak dini serta mempercepat tindak lanjut korektif. Lembaga pengawas perlu dibekali dengan kompetensi teknis dan independensi, serta perlu dilakukan monitoring secara rutin terhadap pencapaian penyerapan anggaran setiap triwulan. Penggunaan teknologi informasi untuk memantau realisasi anggaran secara real-time juga perlu ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ani, L., Mulyadi, J. M. V., & Pratowo, D. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Dengan Perencanaan Anggaran Sebagai Pemoderasi Pada Pemerintah Kota Depok Tahun 2013-2017. *Ekobisman: Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen*, 5(1), 1-16.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2011. *Paris Review: Misteri Penyerapan Anggaran*. Yogyakarta: BPKP.
- Fajar, N., & Arfan, M. (2017). Analisis Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 95-102. <https://jurnal.usk.ac.id/TRA/article/view/14013>
- Hasni, N. T., & Basukianto, B. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. *Jurnal Ilmiah Telaah Manajemen*, 13(1).
- I Made Laut Mertha Jaya. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif : Teori Penerapan dan Riset Nyata*.
- Ihsan, M., & Kuntadi, C. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran: Kualitas Perencanaan, DIPA Yang Berkualitas, Dan Perencanaan Kas Yang Akurat. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik (Jumat)*, 1(2), 323-334.
- Juliani, Dian. "Pengaruh faktor-faktor kontekstual terhadap persepsian penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa". Skripsi. Yogyakarta: FE UGM. 2014.
- Kaharudin Amalliyah, 2023. *Strategi Optimalisasi Penyerapan Anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Depok*.
- Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2019-2023. Mimika. (ID): BPKAD.
- Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2019-2023. Mimika. (ID): BPKAD.
- Lusiawati, L., & Nugaraha, A. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Di Kecamatan X Kota Bandung. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Dan Sains*, 4(1), 85-95.
- Makmur, M. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Serapan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palopo)* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Palopo).
- Mimika, B. PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TIPE A.
- Mulyani, Hendarti, 2021. *Analisis Penumpukan Pencairan Anggaran pada Akhir tahun 2020 di Provinsi Kabupaten Bangka Belitung*
- Patiran, A., & Bonsapia, M. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelaksanaan Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Penyerapan Anggaran Melalui Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 16(1), 188-210.
- Putra, B. A. (2021). Analisis Capaian Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Penyerapan Anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Terhadap Pelaksanaan Belanja

- Langsung Apbd Tahun 2017-2020 Pada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (Dpmppt) Kota Balikpapan (Doctoral Dissertation, Stie Ykpn).
- Ramdhani, D., dan Anisa, I. Z. 2017. 'Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten', *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1): 134–147.
- Rifai, A., Inapty, B. A., & Sri, P. M. (2016). Analisis yang mempengaruhi keterlambatan daya serap anggaran. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 11(1), 1-10.
- Safpremi, Y., Putri, A. M., & Ahyaruddin, M. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kabupaten Pasaman. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 188-199.
- Safpremi, Y., Putri, A. M., & Ahyaruddin, M. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pemerintah kabupaten Pasaman. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 7(2), 188-199.
- Salamah, Siti. 2018. Strategi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal* 7 (1)
- Sari, R. (2021). Analisis Kinerja Penyerapan Anggaran di Dinas Pendidikan: Studi Kasus pada Kabupaten Mimika
- Sugeng Pristianto, Abu Bakar, 2023. FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MIMIKA.
- V. Wiratna Sujarweni. 2022. Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi.
- V. Wiratna Sujarweni. 2023. Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi.
- Waruwu, W. G., Lase, H., Telaumbanua, E., & Bate'e, M. M. (2024). Analisis Kinerja Pegawai Berdasarkan Kemampuan Penyerapan Anggaran Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias. *YUME: Journal of Management*, 7(3), 1041-1045.
- Yunita, N., & Putra, I. S. (2018). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Guna Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Dinas Porbudpar Kota Blitar. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (Peta)*, 3(1), 95-108.
- Zulaikah, B., & Burhany, D. I. (2019, August). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran Pada Triwulan Iv Di Kota Cimahi. In *Prosiding Industrial Research Workshop And National Seminar (Vol. 10, No. 1, Pp. 1221-1234)*.